

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :	Radar Sampit	Halaman :	//
Kompas	Kalteng Pos ✓	Borneo News	
Palangka Post	Tabengan		

Bupati Siap Revisi

Kenaikan Tarif PDAM

SAMPIT-Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H Halikinnor merespon keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif air oleh PDAM Tirta Mentaya. Bahkan, dirinya siap merevisi, apabila kenaikan tarif ini terlalu membebani masyarakat.

"Saya akan melihat perkembangan dulu. Kalau itu sangat membebani masyarakat, maka akan saya revisi. Tapi kita juga harus menjaga jangan sampai PDAM kolap," ujar Halikinnor, Minggu (24/10).

Dikatakannya, kenaikan tarif air PDAM itu hanya untuk golongan menengah ke atas. Sedangkan warga yang tidak mampu tidak ada kenaikan. "Saya belum mendapat laporan mengenai hasil Rapat dengar pendapat (RDP) antara anggota legislatif dan pihak PDAM. Walaupun ada kenaikan yang membebani masyarakat, maka akan saya

revisi," kata Halikinnor.

Pada awalnya, kenaikan tarif PDAM ini dilakukan karena tarif yang digunakan sebelumnya dinilai sudah di bawah standar. Sedangkan, biaya operasional yang dikeluarkan semakin meningkat seiring dengan kenaikan sejumlah elemen atau bahan yang diperlukan, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, zat kimia, dan lain-lain. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif. Namun, hal ini justru menimbulkan penolakan dari sebagian besar masyarakat.

Sedangkan, ia mengaku Pemkab Kotim memang mengurangi penyertaan modal bagi PDAM Tirta Mentaya, yang merupakan salah satu penyokong perusahaan daerah tersebut. Lantaran, keterbatasan anggaran daerah, terlebih selama pandemi Covid-19 banyak

anggaran yang harus dipangkas dan dialihkan untuk penanganan pandemi tersebut

"Saat ini anggaran kita terbatas, sehingga kami mengurangi penyertaan modal," ucapnya.

Namun, Sebagai pimpinan daerah, Halikinnor berjanji akan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jika memang kenaikan tarif ini harus direvisi, maka hal itu akan dilakukan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan polemik ini terjadi hanya karena kurang sosialisasi mengenai kenaikan tarif tersebut.

Sehingga membuat warga yang baru mengetahui ketika akan membayar tagihan kaget dan tidak terima. Jika begitu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi terkait kenaikan tarif ini. "Makanya, saya akan pelajari dulu sambil menunggu laporannya," terangnya. (sli/ans)